

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-Government DALAM MENDONGKRAK POTENSI DAERAH DI JAWA TIMUR

E-Government POLICY IMPLEMENTATION IN IMPROVING THE POTENTIAL AREAS IN EAST JAVA

M. Amir. HT

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Jalan Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya
E-mail: amirlitbang@yahoo.co.id

Diterima : 21 Oktober 2015; direvisi :20 November 2015 ; disetujui : 25 November 2015

ABSTRAK

Kajian ini bersifat diskriptif, analisis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan implementasi kebijakan E-Gov pada institusi pemerintah bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan dalam teknik kajian yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara (interview), dan focused group discussion di lokus kajian. Teknik analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisa model interaktif (interactive of analysis) yang dikembangkan oleh (Miles dan Huberman 1992, h.16) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu: Reduksi data (reduction data), kemudian sajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drwing), yakni sejak awal memasuki lokasi kajian dan selama proses pengumpulan data. Tujuan dari kajian ini, dapat disusun sebagai berikut: Mengetahui implementasi kebijakan E-Gov bidang perdagangan dan perindustrian, menemukan penerapan kebijakan pemerintah daerah terhadap penetapan kinerja perdagangan dan perindustrian dalam mendongkrak potensi daerah, dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan dan perindustrian di Jawa Timur.

Kata kunci: *E-Government mendongkrak potensi daerah*

ABSTRACT

This is a descriptive study, the analysis begins by describing the phenomena that occur related to the implementation of E-Gov policy in the field of government agency Trade and Industry. In order to provide a sharper focus on the issues discussed, the researchers felt the need to impose limits on assessment techniques used are observation, documentation, interview (interview), and the growth focus discussion on the locus of the study. Analysis technique used in this study is an analysis model of interactivity (interactive of analysis) developed by (Miles and Huberman, 1992, p.16), which consists of three components of the analysis, namely: data reduction (reduction of data), then data presentation (Data display), and conclusion or verification (conclusion drwing), ie since the beginning of the study and location entered during the data collection process. So the purpose of this study, it can be structured as follows: Knowing the policy implementation of the E-Gov fields of trade and industry, found the implementation of local government policy on performance evaluation of trade and industry in boosting the potential of the region, and identify the obstacles encountered in the implementation of the policy of trade and industry in East Java.

Keywords: *E-Government to boost the regional potential*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik selama era otonomi daerah berlangsung. Salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau e-government.

E-Gov di Indonesia mulai dilirik sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (*Telekomunikasi, Media dan Informatika*) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.

Namun dalam perjalanannya inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan serta respon dari segenap pemangku kepentingan pemerintah yaitu ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal.

Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan *E-Government* di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi, dalam tahapan *layne and lee* baru masuk dalam *Cataloguing*. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasinya karena anggaran yang terbatas.

Sementara itu hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (*Jakarta Post*, 15 Januari 2003). Indikator lainnya adalah penetrasi internet baru mencapai 1,9 juta penduduk atau 7,6 persen dari total populasi Indonesia pada tahun 2001. Pada tahun 2002 dengan 667.000 jumlah pelanggan internet dan 4.500.000 pengguna komputer dan telepon, persentasi penggunaan internet di Indonesia sangatlah rendah. (*Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII*).

Pada tahun 2003, di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih fokus terhadap pelaksanaan E-Gov, melalui Instruksi Presiden yaitu Inpres Nomor 3 tahun 2003. Inpres ini berisi tentang Strategi Pengembangan E-gov yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai panduan tentang e-gov seperti: Panduan Pembangunan Infrastruktur

Portal Pemerintah; Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah; Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah dan lain-lain.

Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Depkominfo pada tahun 2004 yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan e-gov di pusat dan daerah. Dalam Inpres ini, Presiden dengan tegas memerintahkan kepada seluruh Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk membangun E-government dengan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi.

Di lihat dari pelaksanaan aplikasi e-gov setelah keluarnya Inpres ini maka dapat dikatakan bahwa perkembangan pelaksanaan implementasi E-Gov masih jauh dari harapan. Data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia baru memiliki:

- a. 564 domain go.id;
- b. 295 website pemerintah pusat dan pemda;
- c. 226 website telah mulai memberikan layanan publik melalui website
- d. 198 website pemda masih dikelola secara aktif.

Pusat Kajian Komunikasi (PUSKAKOM) UI (14 April 2015) melakukan rilis pers tentang hasil survey profil pengguna internet di Indonesia. Hal menarik pertama tahun 2015 ditemukan adalah sebuah fakta bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mencapai angka 88,1 Juta. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang ada 252,4 Juta, maka dapat dikatakan bahwa penetrasi pengguna internet di negara ini mencapai 34,9%. Angka tersebut meningkat cukup banyak bila dibandingkan dengan tahun 2013 dimana penetrasi internet baru mencapai 28,6%.

Wilayah Jawa dan Bali menjadi wilayah yang memiliki pengguna internet terbanyak di Indonesia dengan 52 Juta. Disusul dengan Sumatra yang berjumlah 18,6 Juta dan Sulawesi yang memiliki 7,3 Juta pengguna internet. Wilayah Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku memiliki jumlah 5,9 Juta. Dan terakhir, wilayah Kalimantan dengan jumlah pengguna internet sebanyak 4,2 Juta. Jawa Barat menjadi provinsi dengan pengguna internet terbanyak, yaitu sebanyak 16,4 Juta.

Angka yang cukup mengejutkan dipatok

oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (*Kemkominfo*) terkait jumlah pengguna Internet di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi dan Teknologi Informatika *Kemkominfo* Bambang Heru Tjahjono, seperti dikutip dari Antara, *Kemkominfo* berharap di akhir tahun 2015 jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai angka 150 juta orang, atau sekitar 61% dari total penduduk.

Dari sumber yang sama, *Kemkominfo* mengklaim bahwa saat ini jumlah pengguna Internet di Indonesia sudah mencapai 57% penduduk, atau kasarnya mencapai hampir 137 juta pengguna. Angka yang cukup fantastis mengingat awal tahun ini APJII mencatat jumlah pengguna Internet di tanah air baru berkisar di angka 71 juta dan perkiraan banyak pihak akhir tahun 2014 jumlahnya baru mencapai kisaran 80-an juta pengguna.

Memang Indonesia sedang berlomba mengejar target yang ditetapkan oleh Millennium Development Goals yang mensyaratkan akses Internet di negara berkembang mencapai angka 50% dari total penduduk. Menurut standar tersebut, pengguna Internet di Indonesia seharusnya mencapai angka 107 juta di akhir tahun 2014 dan 139 juta pengguna di akhir tahun 2015.

Pergantian pemerintahan tentu saja membawa optimisme baru. Salah satunya adalah isyarat *Menkominfo* Rudiantara yang menantang operator seluler untuk uji coba 4G/FDD-LTE. Izin pengelolaan LTE memang belum turun dari pemerintah karena lambatnya perampungan regulasi. Sebagai negara *mobile-first*, sangat wajar jika pembangunan infrastruktur seluler menjadi ujung tombak dalam perluasan akses Internet ke seluruh pelosok Indonesia. Saat ini baru Bolt yang sudah secara resmi menggelar teknologi TD-LTE di kawasan Jabodetabek.

Beberapa pemerintah daerah memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemerintah Kota Surabaya sudah mulai memanfaatkan *e-gov* untuk proses pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan *e-gov* seperti: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, dan Pemkab Malang.

METODE PENELITIAN

A. Materi Kajian

Kajian ini bersifat deskriptif, analisis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan implementasi kebijakan *E-Gov* pada institusi pemerintah bidang Perdagangan dan Perindustrian. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di daerah obyek kajian.

B. Lokasi dan Jangka Waktu Kajian

Lokasi kajian ini, meliputi empat daerah yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Banyuwangi. Adapun rentang waktu kajian dimulai bulan Januari sampai Desember 2015.

C. Teknik pengambilan dan pengumpulan data

Teknik pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara bersama informan. Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan kajian yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan dalam teknik kajian yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara (*interview*), dan *focused group discussion* di lokus kajian.

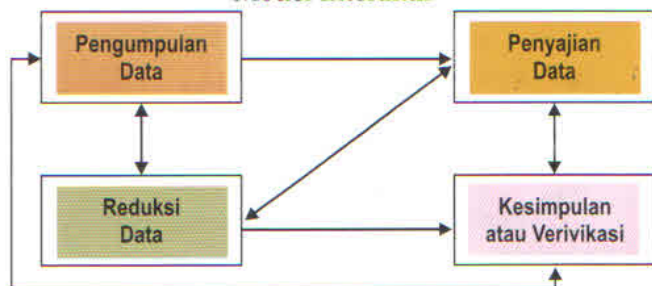
D. Analisis data

Teknik analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisa model interaktif (*interactive of analysis*) yang

dikembangkan oleh (Miles dan Huberman 1992, h.16) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu: Reduksi data (*reduction data*), yakni data yang diperoleh di lokasi kajian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci, sajian data (*data display*), yakni memudahkan bagi peneliti, kemudian penyajian data untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari kajian ini, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drwing*), yakni sejak awal memasuki lokasi kajian dan selama proses pengumpulan data.

Sistem kerja teknik analisa data model interaktif tersebut dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut (Miles dan Huberman 1992, h.20):

Gambar: 1. Komponen-komponen Analisa Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman, (1992, h.20)

Dalam analisa data kualitatif model interaktif yang digunakan peneliti merupakan upaya terus menerus yang mencakup tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari kegiatan lapangan (Miles and Huberman, 1992, h.16).

Oleh karena itu, dalam kajian ini, setiap data-data diperoleh mengenai bagaimana implementasi kebijakan E-Gov pada institusi pemerintah bidang Perdagangan dan Perindustrian yang dilaksanakan oleh ke empat daerah sampel, dilakukan dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan tersebut dianalisis secara lebih mendalam sehingga memperoleh hasil kajian yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan E-Gov

E-Government sering disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, pelaku usaha, serta hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, penyelenggaraan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G).

Kegunaan E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini, apabila dilaksanakan secara baik.

Secara umum tahapan pelaksanaan e-government biasanya dipilih adalah:

- (1) Membangun sistem e-mail dan jaringan,-
- (2) Meningkatkan kemampuan organisasi dan publik dalam mengakses informasi,-
- (3) Menciptakan komunikasi dua arah antar pemerintah dan masyarakat,-
- (4) Memulai pertukaran value antara pemerintah dan masyarakat, dan
- (5) Menyiapkan portal yang informatif.

Membangun sistem e-mail dan jaringan biasanya dapat dimulai dengan mengintalasi suatu aplikasi untuk mendukung fungsi administrasi dasar seperti sistem penggajian dan data yang diperlukan.

B. Aplikasi e-gov dan Infrastruktur

Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan,

dari kios info ataupun dari internet, penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga ditempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi, juga e-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara online dan transparan.

United Nations E-Government Survey Releases 2012 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 7 dari 11 negara di Asia Tenggara dibawah Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philipina dan Thiland.

Keberhasilan Pemerintah Singapura dalam mengimplementasikan e-Government telah dianalisis oleh Chan, Lau, Pan dalam penelitian yang berjudul "*E-government implementation: A macro analysis of Singapore's e-government initiatives*". Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa keberhasilan e-Government Pemerintah Singapura ditopang oleh empat komponen utama, yakni: (1) isi informasi, (2) infrastruktur ICT, (3) infrastruktur e-government, dan (4) promosi e-government.

Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Maka secara sederhana Heeks dalam membagi pengertian E-Government ke dalam lima tingkatan, yang semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi, yaitu:

(1) Tingkatan pertama adalah apa yang disebut dengan E-Government untuk menunjukkan "*wajah*" pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitas yang ada di dalamnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai website yang cantik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada dasarnya, E-Government tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi E-Government yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan

untuk membentuk suatu pemerintahan dengan Good Governance.

- (2) Tingkat kedua dari E-Government, mulai ditandai dengan adanya transaksi dan interaksi secara *online* antara suatu institusi pemerintah dengan masyarakat. Misalnya, masyarakat tidak perlu lagi antri membayar tagihan listrik, memperpanjang KTP, dan lain sebagainya. Semuanya dapat dilakukan secara online. Usaha ke arah ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa institusi dipusat maupun di daerah. Kota Surabaya merupakan salah satu contoh daerah yang sudah mulai menerapkan layanan satu atap terhadap masyarakatnya. Komunikasi dua arah antara institusi pemerintah dengan masyarakat sudah mulai terjalin secara online.
- (3) Tingkat ketiga dari E-Government, memerlukan kerja sama (*kolaborasi*) secara online antar beberapa institusi dan masyarakat. Apabila masyarakat sudah bisa mengurus perpanjangan KTP-nya secara online, selanjutnya mereka tidak perlu lagi melampirkan KTP-nya untuk mengurus Pasport atau membuat SIM. Dalam hal ini perlu kerja sama antara Kantor Kelurahan yang mengeluarkan KTP dengan Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Pasport atau Kantor Polisi yang mengeluarkan SIM.
- (4) Tingkat keempat dari E-Government sudah semakin kompleks. Bukan hanya memerlukan kerja sama antar institusi dan masyarakat, tetapi juga menyangkut arsitektur teknis yang semakin kompleks. Dalam level ini, seseorang bisa mengganti informasi yang menyangkut dirinya hanya dengan satu klik, dan pergantian tersebut secara otomatis berlaku untuk setiap institusi pemerintah yang terkait. Misalnya, seseorang yang pindah alamat, dia cukup mengganti alamatnya tersebut dari suatu database milik pemerintahan yang besar, dan secara otomatis KTP, SIM, Pasport dan lain-lainnya ter-update.
- (5) Tingkat kelima, dimana pemerintah sudah memberikan informasi yang terpaket (*packaged information*) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sudah bisa

memberikan apa yang disebut dengan "informationpush" yang berorientasi kepada masyarakat. Masyarakat benar-benar seperti raja yang dilayani oleh pemerintah. Apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, E-Government pada level lima ini mampu menyediakannya.

C. Penerapan Kebijakan Perindag di Jawa Timur

Dari uraian secara makro diatas di level nasional, maka dapat disajikan bagaimana pelaksanaan di provinsi dan daerah di-era otonomi daerah saat ini, dapat disimak sebagai berikut:

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kab. Blitar, dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab.

Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi. Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab Sumenep.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Secara umum perangkat daerah atau sering disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah.

Lebih lanjut dapat disimak pada SKPD di Provinsi Jawa Timur yang sudah mempunyai website tersendiri, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 1
SKPD Provinsi Jawa Timur yang memiliki website

I. SEKRETARIAT DAERAH	STATUS EKSEKUTIF	ALAMAT/ EMAIL
Sekretaris Daerah Propinsi	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3557139, 352400 – 11 psw.1102 Fax. 031 3557138	
Asisten Pemerintahan	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3542961, 3524001 psw. 1107	
Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3542961, 3524001 psw. 1105	
Asisten Kesejahteraan Masyarakat	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3542961, 3524001 psw. 1104	
Asisten Administrasi Umum	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3542961, 3524001 psw. 1106	
Biro Administrasi Pemerintahan Umum	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 352400-11 psw 1125 Fax. 031 3524259, http://ropem.jatimprov.go.id	
Biro Administrasi kerja sama	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3524001-11, 3554161 http://eastjavacoop.jatimprov.go.id	
Biro Hukum	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp 0313520881, 3524001psw.1118, http://jdih.jatimprov.go.id	
Biro Administrasi Perekonomian	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3550958, 3524001 -11 psw. 1122 http://ro-ekonomi.jatimprov.go.id	
Biro Administrasi Pembangunan	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3550950, 3524001 – 11 psw 1120 http://ro-admpembangunan.jatimprov.go.id/	
Biro Administrasi Sumber Daya alam	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3557128 http://sda.jatimprov.go.id/	
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3550657, 3545235 http://ro-kesra.jatimprov.go.id	
Biro Administrasi Kemasyarakatan	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3533883, 3524001 – 11 psw. 1123 http://ro-adkesmas.jatimprov.go.id	

	Biro Humas dan Protokol	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 3557141, 3524001 – 11 psw. 1116 http://birohumas.jatimprov.go.id
	Biro Organisasi	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp 031 3533832, 3524001-11 psw. 1128 http://ro-organisasi.jatimprov.go.id
	Biro Umum	Jl Pahlawan 110 Surabaya, Telp. 031 352851 http://ro-umum.jatimprov.go.id/
II. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur	Status Legislatif	Jl Indrapura No. 1 Surabaya, Telp. 031 3531126 – 29, 3526130, 3551285, http://dprd.jatimprov.go.id
III. Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur	Status Eksekutif	
	Dinas Kesehatan	JL Jend A Yani No 118 Surabaya , Telp. 031 8280713 -714, 8280910 Fax. 0318290423, http://dinkes.jatimprov.go.id
	Dinas Sosial	Jl Gayung Kebonsari No 56 B Surabaya, Telp. 031 8290794 , 8296515 http://dinsos.jatimprov.go.id
	Dinas Pendidikan	Jl Genteng kali 33 Surabaya, Telp 031 5342706, 5342707, 5344508 Fax. 031 5465413, 5346707, http://dindik.jatimprov.go.id
	Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jl Jend A Yani 268 Surabaya , Telp. 031 8292276, 8291530 Fax. 031 8292433 http://dishublaj.jatimprov.go.id/web/
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl A Yani 242 -244 Surabaya, Telp. 031 8294608, Fax. 031 8294517 http://kominfo.jatimprov.go.id
	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	Jl Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya, Telp. 031 8290005, 8280254 Fax. 031 8292996, http://disnakertransduk.jatimprov.go.id
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl Wisata Menanggal Surabaya, Telp. 031 8531814 – 16, 8531820 Fax. 031 8531822, http://disbudpar.jatimprov.go.id
	Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah(UMKM)	Jl Raya Bandara Juanda Sidoarjo, Telp. 031 8671330, 8675082, 8665607, 8677183, 8683686, 8676645-48, Fax. 031 8671330 http://diskopumkm.jatimprov.go.id
	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Jl Kayon 56 Surabaya, Telp. 031 5345507, Fax. 031 5345508 http://dispورا.jatimprov.go.id
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Jl Gayung Kebonsari 167 Surabaya, Telp 031 8290186, 8282690 http://binamarga.jatimprov.go.id/
	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Jl Gayung Kebonsari 169 Surabaya, Telp. 031 8273078, 8292419 Fax. 031 8292047, http://dpuair.jatimprov.go.id
	Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya dan Tata Ruang	Jl Gayung Kebonsari 169 Surabaya, Telp. 031 8287275, Fax. 031 8286615, 8292270, http://www.pucktr.jatimprov.go.id
	Dinas Pertanian	Jl A Yani 152 Surabaya , Telp. 031 8290177 , Fax. 031 8290407 http://pertanian.jatimprov.go.id
	Dinas Perkebunan	Jl Gayung Kebonsari 171 Surabaya, Telp. 031 8291990 Fax. 031 8281767, http://disbun.jatimprov.go.id/
	Dinas Peternakan	Jl A Yani 202 Surabaya , Telp. 031 8292545, 8280445, 8285126-27 Fax. 031 8291853, 8287165, http://disnak.jatimprov.go.id
	Dinas Perikanan dan Kelautan	Jl A Yani 152 B Surabaya , Telp. 031 8291927, 8281672, 8288564, 8288112, 8292326, Fax. 031 8288148, http://diskanlut.jatimprov.go.id
	Dinas Kehutanan	Jl Bandara Juanda Sidoarjo, Telp. 031 8666549, Fax. 031 8667858 http://dishut.jatimprov.go.id
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jl Siwalan Kerto Utara III/42 Surabaya, Telp. 031 8499895 Fax 031 8432417, http://disperindag.jatimprov.go.id
	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Jl Tidar 123 Surabaya, Telp 031 5485236, Fax. 031 5319337 http://esdm.jatimprov.go.id
	Dinas Pendapatan	Jl Manyar Kertoarjo 1 Surabaya, Telp. 031 5947953, 5941162, 5941163 Fax. 031 5941165, http://www.dipendajitim.go.id
IV. Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Status Eksekutif	Jl Raya Juanda Sidoarjo, Telp. 031 8540616 psw.106, 107, 201 Fax. 031 8548153, http://inspektorat.jatimprov.go.id
V. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	Status Eksekutif	Jl Pahlawan 102-108 Surabaya, Telp 031 3554853, 3554856 http://bappeda.jatimprov.go.id
VI. Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur	Status Eksekutif	Alamat/ Email
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl Putat Indah 1 Surabaya, Telp. 031 5677935, 5681297, 5675493 http://bakesbangpol.jatimprov.go.id
	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl Gayung Kebonsari 56 Surabaya, Telp. 031 8290738 Fax. 031 8290719, http://balitbang.jatimprov.go.id

Badan Pendidikan dan Pelatihan	Jl Balongsari Tama Tandes Surabaya, Telp. 031 741 2278 Fax. 031 7412279, http://www.bandiklatjatim.go.id
Badan Pemberdayaan Masyarakat	Jl A Yani 152 C Surabaya, Telp. 031 8292591, Fax. 031 8292591 http://bapemas.jatimprov.go.id
Badan Lingkungan Hidup	Jl Wisata Menanggal 28 Surabaya, Telp. 031 8543852, 8543853 Fax. 031 8543851, http://blh.jatimprov.go.id
Badan Penanaman Modal	Jl Jagir Wonokromo 352 Surabaya, Telp 031 8410877, 8418676 Fax. 031 842363, http://bpm.jatimprov.go.id
Badan Ketahanan Pangan	Jl Gayung Kebonsari 173 Surabaya, Telp. 031 8280879 Fax. 031 8291424, http://bkp.jatimprov.go.id
Badan Perpustakaan dan Kearsipan	Jl Menur Pumpungan 32 Surabaya, Telp 031 5947830 Fax. 031 5921055, http://bapersip.jatimprov.go.id
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Jl Ngagel Jaya Tengah 102 Surabaya, Telp. 031 5032534, 031 5027866 Fax. 031 5032534, http://bppkb.jatimprov.go.id
Badan Kepegawaian Daerah	Jl Jemur Handayani 1 Surabaya, Telp. 031 8477551 Fax 031 8477404, http://bkd.jatimprov.go.id
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jl Johar 17 Surabaya Telp. 031 577991 http://bpkad.jatimprov.go.id
Kantor Perwakilan	Jl Pasuruan 16-20 Menteng Jakarta Pusat, Telp. 021 3151902 Fax. 021 3100393, http://perwakilan.jatimprov.go.id

VII. Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo	Jl Mayjen Prof DR Moestopo 6-8 Surabaya Telp. 031 5501011 -12, http://rsudrsuetomo.jatimprov.go.id
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar	Jl Jaksa Agung Suprpto 2 Malang, Telp. 0341. 362101, Fax. 0341 369384, http://rsusaifulanwar.jatimprov.go.id
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono	Jl Dr Soetomo 59 Madiun, Telp. 0351 496348, 454657 Fax. 0351 458054, 459196 http://rssoedonomadiun.co.id
Rumah Sakit Umum Daerah Haji	Jl Manyar Kertoadi Surabaya, Telp. 031 5924000 Fax. 031 5947890, http://rsuhaji.jatimprov.go.id
Rumah Sakit Jiwa Menur	Jalan Menur 120 Surabaya, Telp 031 5021635, 5021637 http://rsjmenur.jatimprov.go.id

VIII. Badan koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur

BAKORWIL – I	Jl Pahlawan 31 Madiun, Telp 0351 462001 http://bakorwilmadiun.jatimprov.go.id
BAKORWIL – II	Jl Pahlawan 5 Bojonegoro, Telp. 0353 881901, 880708 psw 103 Fax. 0353 881142, http://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id
BAKORWIL – III	Jl Simpang Ijen 2 Malang, Telp 0341 551321 http://bakorwilmalang.jatimprov.go.id
BAKORWIL – IV	Jl Slamet Riyadi 1 Pamekasan, Telp 0324 322530 http://bakorwilpamekasan.jatimprov.go.id

IX. Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. S Parman No 55 Waru Sidoarjo Telp. 031 8550222 Fax. 031 8550101, http://bpbd.jatimprov.go.id
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi	Jl. Pahlawan No 110, Telp. 031 3524001 – 11 Psw 1365 Fax. 031 3538578, http://korpri.jatimprov.go.id
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	Jl. Ngagel Timur No. 52-54 Surabaya, Telp. 031 5024526, 5024528 Fax. 031 5024561, 5024580, http://kpid.jatimprov.go.id

X. Satuan Polisi Pamong Praja Prov Jatim

Jl Jagir Wonokromo No. 352 Surabaya, Telp (031) 8412159,
Fax (031) 8412259, <http://satpolpp.jatimprov.go.id>

<http://www.jatimprov.go.id/> Situs resmi. berisi berita, profil daerah dan pemerintahan, dan berbagai artikel.(diolah)

D. Kompetensi Inti Daerah Sampel

Electronic Government (E-Government) merupakan suatu mekanisme interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat dan

kalangan lain yang berkepentingan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi (*terutama Internet*) dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan yang telah berjalan menjadi lebih baik.

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu: pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.

Tujuan implementasi e-government antara lain meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informatika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan.

Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah, melalui:

(a) Program Pengembangan Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

(1). Perdagangan

- * Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- * Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- * Peningkatan Perlindungan Konsumen
- * Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

(2). Industri

- * Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri
- * Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia

- * Peningkatan Standarisasi Industri
- * Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

(3). Komoditi Pengungkit

Perekonomian Jawa Timur

- * Industri Perhiasan
- * Industri Kulit dan Alas kaki
- * Industri Perkapalan
- * Industri Berbasis tebu
- * Industri Makanan dan Minuman
- * Industri Logam (Supporting)
- * Industri Kecil Kayu & Mebel Kayu
- * Industri Batik & Bordir
- * Industri Kecil Berbasis Aromatik
- * Industri Keramik
- * Industri Kecil Batik & Bordir ,
- * Industri Berbasis Seni dan Budaya

(b) Mengembangkan kemitraan

Mengembangkan kemitraan dengan pengusaha-pengusaha besar dan membukakan jaringan-jaringan yang bisa membantu kemajuan kerajinan Produk unggulan merupakan penentu untuk kemajuan daerah, untuk itu dapat disimak kompetensi inti daerah sebagaimana tabel dibawah:

Tabel: 2

Kompetensi inti daerah sampel

No.	Kabupaten	Kompetensi Inti daerah	Ovop	Industri Kreatif	Argo
1.	Bangkalan	Batik	Tali Agel	Krupuk hasil laut	Salak
2.	Magetan	Kerajinan Kulit	Ayaman Bambu	Batik	Jeruk Pamele
3.	Lumajang	Perhiasan Perak	Keripik Pisang	Perhiasan Perak	Olahan Pisang
4.	Banyuwangi	Batik Gajah Oling	Industri rekaman seni tari gandrung	Kerajinan pelepah pisang dan enceng gondok	Olahan Buah

Sumber: Disperindag Prov. Jatim

Untuk itu perlu untuk lebih diberdayakan, disetiap kabupaten/kota dalam penerapan e-gov yang memiliki produk unggulan diantaranya adalah kerajinan kulit. Kerajinan kulit merupakan salah satu potensi yang sedang dikembangkan karena usaha kerajinan ini bersifat turun temurun dan banyak menyerap tenaga kerja sehingga memang perlu diberdayakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disimak aktivitas masing-masing daerah sampel dalam penerapan e-government bidang perdagangan dan perindustrian, sebagaimana disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel: 3
 Aktivitas Disperindag Kab. Bangkalan dalam Implementasi E-Gov

No.	Implementasi E-Gov	Penerapan Kebijakan Daerah	Hambatan dialami	Masukan
1.	1. Pelaksanaan E-Gov telah menggunakan perangkat Komputerisasi dan penyediaan WIFI,-	1. Kebijakan E-Gov meningkatkan kinerja perindag, mempermudah aktivitas mencapai produktivitas,-	1. Sarana dan Prasarana kurang memadai,-	1. Perlu mengadakan pembinaan SDM, didukung sarana & prasarana peralatannya,-
	2. Brainware atau SDM pengelola dlm penggunaan website dan server bekerjasama dgn Pemerintah daerah/Bappeda dan Dishubkominfo,-	2. Kepastian pelayanan disperindag melalui website (a) adanya data potensi komoditi bid. Perindag, (b) penyebaran informasi harga bahan pokok,-	2. Koordinasi kurang dilaksanakan secara maksimal,-	2. Kegiatan operasi pasar dibutuhkan oleh masyarakat,-
	3. Software atau standar aplikasi Penggunaan website melalui sistem satu pintu dikoordinir oleh Dishubkominfo,-	3. Penerapan kebijakan daerah dapat meningkatkan SDM dgn arah kebijakan yg telah ditetapkan,-	3. Sumber daya manusia, sarana terbatas, sehingga penggunaan website belum maksimal,-	3. Upaya menekan harga kebutuhan pokok, melalui operasi pasar secara berkesinambungan,-
	4. Haedware atau jaringan infrastruktur E-Gov dirintis Dishubkominfo sejak 2011, dgn membuat data center, portal website, menyiapkan sub domain utk SKPD,-	4. Bisa diakses public sub domain www.bangkalankab.go.id	4. Seharusnya sektor perijinan, proses perijinan usaha dgn cara muda & murah,-	4. Melaksanakan tindakan mengacu SOP,-
	5. Implementasi atau konektivitasnya Pola kerja lebih terarah dan terorganisir. Mudah diakses dan diterima oleh masyarakat. Web Link Perindustrian Dan Perdagangan	5. Kebijakan daerah. Perda No.5 tahun 2010 tentang investasi pemerintah daerah dan Perda No.6 tahun 2012 tentang penanaman modal.	5. Perlu ada konter-konter dialog, masyarakat dan pelaku usaha, terutama industri & perdagangan.	5. Perindag lebih mengikutsertakan FGD tajuk potensi daerah utk menggali masukan dari bawah.

Sumber: Hasil Kegiatan FGD di Bappeda Kab. Bangkalan (diolah)

Kemudian tabel 4 aktivitas perindag di Kabupaten Magetan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel: 4
 Aktivitas Disperindag Kab. Magetan dalam Implementasi E-Gov

No.	Implementasi E-Gov	Penerapan Kebijakan Daerah	Hambatan dialami	Masukan
1.	1. Pelaksanaan implementasi E-Gov Disperindag belum dilaksanakan, kecuali laporan harga sembako, melalui website Disperindag Prov. Jatim www.siskaperbapo.com	1. Penerapan kebijakan daerah terhadap kinerja Perindag telah diterbitkan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan dan Penataan Pasar,-	1. Kinerja Perindag dlm merevitalisasi hanya tersedia dana DAK, shg rehabilitasinya mengikuti juknis Kemedag,-	1. Kebijakan E-Gov sangat baik utk ditindak lanjuti dlm rangka menginformasikan produk kpd masyarakat,-
	2. Brainware atau SDM pengelola; Pelaksanaan kegiatan Bid. Perindag telah menggunakan komputerisasi, tetapi belum ada operator,-	2. Kemudian Perbup No. 6 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern,-	2. Pemanfaatan web sebagai media informasi kpd masyarakat dlm rangka meningkatkan kinerja perindag, terkendala SDM yg trampil/ ahli dibidang TI.	2. Dampak dari kebijakan daerah terhadap bidang Perindag belum mempunyai dampak yang signifikan,-
	3. Software atau standar aplikasi masih lemah dalam wujud kinerja Perindag yaitu: (a) memfasilitasi pedagang argo utk memasarkan produknya diluar. (b) pembinaan PKS & Asongan, peningkatan mutu dagangan. (c) tera ulang UTTP. (d) pengawasan barang & jasa yg beredar. (e) rehabilitasi pasar. (f) mengikuti pameran di berbagai daerah,-	3. Implementasi E-Gov dpt meningkatkan kinerja Perindag, karena Dishubkominfo, sebagai pembina kelompok informasi masyarakat (KIM), & telencenter, berusaha mengangkat seluruh potensi yg ada di daerah,-	3. Kebijakan Perindag masih sedikit pelaku usaha yg profesional karena sebagian besar pelaku usaha hanyalah industri kecil dan rumah tangga,-	3. E-Gov masih belum dapat perhatian serius dari Pejabat & Pimpinan. Urusan kominfo belum menjadi wewenang dlm satu SKPD, masuk dlm wewenang beberapa SKPD,-
	4. Hardware atau jaringan infrastruktur di Dishubkominfo telah menggunakan perangkat komputer tetapi sebatas aplikasi perkantoran, belum menerapkan sisten informasi manajemen berbasis TI. Pola kerja Perindag dilaksanakan swakelola & kerjasamanya dgn pihak ketiga. Website dinas sudah difasilitasi oleh pengelolaan data elektronik pd Bappeda yg mempunyai tupoksi E-Gov.	4. Kinerja Perindag sudah masuk dlm prioritas pembangunan daerah yaitu pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan plus pengetasan kemiskinan.	4. Hambatan yg dialami dlm penerapan bidang industri dan perdagangan: (a) proses produksi masih tradisional (b) kualitas belum terstandarisasi. (c) pelaku usaha belum profesional (d) pengemasan produk belum optimal.	4. Pengelolaan data elektronik berada di Litbang, PDE Bappeda. Disiminasi informasi berada di Humas/Protokol. Regulasi Pembinaan jaringan Telkom berada di Dishubkominfo.

5. Implementasi atau konektivitasnya Pola kerja belum terarah dan terorganisir. sulit diakses dan diterima oleh masyarakat.	5. Implementasinya berjalan normatif belum ada terobosan meningkatkan bid. Perindag, terutama pemanfaatan TI & komunikasi. www.magetan.co.id	5. Perlu ada konter-konter dialog, masyarakat dan pelaku usaha, terutama industri & perdagangan dlm promosi produk.	5. Perindag lebih mengikutsertakan even promosi melalui pameran tajuk potensi daerah utk menggali masukan dari konsumen.
---	---	---	--

Sumber: Hasil Kegiatan FGD di Bappeda Kab. Magetan (diolah).

Selanjutnya tabel 5 penerapan disperindag Kabupaten Lumajang sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel: 5
Aktivitas Disperindag Kab. Lumajang dalam Implementasi E-Gov

No.	Implementasi E-Gov	Penerapan Kebijakan Daerah	Hambatan dialami	Masukan
1.	1. Pelaksanaan E-Gov menggunakan komputer & email guna melayani masyarakat yg butuh data atau informasi,-	1. Penerapan kebijakan daerah terhadap kinerja Perindag dlm pengendalian inflasi daerah, dgn menjadi anggota Tim Pengendali inflasi daerah,-	1. Masih lambatnya informasi dari pusat sehingga peraturan yg dibutuhkan masyarakat, sehingga kadang pengusaha mengerti daripada petugas yg melayani,-	1. Mengatasi hambatan kerja, memanfaatkan bahan baku yg tersedia & melestarikannya, shg apabila ada permintaan dari luar daerah dapat mencukupi,-
2.	2. Brainware atau SDM pengelola dlm memanfaatkan Website yg ada belum dioptimalkan penggunaannya, sehingga kalau ada permintaan/pertanyaan dari masyarakat tidak diketahui karena tidak aktif,-	2. Kalau terjadi lonjakan harga, khususnya bahan pokok sgr dilakukan koordinasi dgn instansi terkait utk mengantisipasi gejolak harga yg berkepanjangan dgn melakukan operasi pasar,-	2. Terbatasnya SDM yg menangani pelayanan masyarakat, kalau ada masalah berkoordinasi/ konsultasi ke pusat atau provinsi,-	2. Langkah mengatasi hambatan mengidentifikasi hambatan/kendala, membuat laporan langsung keatasan,-
3.	3. Software atau standar aplikasi dlm wujud kepastian pelayanan Perindag belum maksimal, sehingga kita masih perlu tata muka dgn masyarakat terutama UKM dlm pengembangan usahanya,-	3. Wujud kinerja perindag, melakukan pemantauan, monitoring & evaluasi perkembangan harga, pengawasan barang beredar terutama barang yg sudah kadaluarsa & tidak sesuai dgn aturan,-	3. Terkendala minimnya personil yg dimiliki instansi, perlu peningkatan SDM aparatur pelayanan,-	3. Pelaksanaan E-Gov sangat membantu melayani masyarakat & memerlukan waktu yg singkat & biaya murah,-
4.	4. Hardware atau jaringan infrastrukturnya dlm Pola kerja perindag, memantau harga ke 4 pasar tradisional, dikomputer & dievaluasi sebulan sekali, dimasukan dlm modem & dikirim ke Provinsi melalui program Siskaperbapo,-	4. Dengan penerapan kebijakan daerah berdampak meningkatkan industri dan perdagangan, melalui pelayanan perijinan satu pintu,-	4. Keterbatasan teknologi yg dimiliki, lemahnya TI di masyarakat. Kendala SDM, keterbatasan pihak ke tiga di kabupaten dikaitkan dgn regulasi yg ada,-	4. Implementasi kebijakan E-Gov masih perlu ditingkatkan utk menunjang kinerja, pelayanan masih jempot bola,-
5.	5. Implementasi atau konektivitas E-Gov, belum berjalan maksimal, terkendala jaringan lunak, minimnya pengetahuan, wawasan ttg E-Gov masing2 bidang. Bidang perdagangan sudah berjalan dgn ditetapkannya program pemantauan harga sembako secara online. Program pemantauan harga sembako secara online khusus bidang perdagangan menggunakan perangkat komputerisasi & punya server khusus ttg sembako. Penggunaan website belum bisa diakses masyarakat karena website belum disosialisasikan ke masyarakat, hanya pengelola kebijakan saja. www.lumajangkab.go.id	5. Wujud kinerja dgn mengimput data-data perencanaan pembangunan (musrebang) utk dimasukan ke akses aplikasi musrebang secara online. Penerapan kebijakan daerah telah diaplikasikan, transparan & akuntabel masih byk ditemui kendala teknis. Wujud kinerja lebih transparan, akuntabel.	5. Hambatan SDM masih lemah, infrastruktur, jaringan online, mengkombinasi-kan dgn metode manual. Kurang SDM kompetensi bidang teknik komputer & jaringan, kurang dukungan anggaran utk mengembangkan TIK sebagai penunjang.	5. Perlu sosialisasi implementasi kebijakan E-Gov, perlu peningkatan Diklat Aparatur ttg E-Gov, perlu peningkatan teknologi yg mampu mengakses informasi. E-Gov perlu mendukung kinerja aparatur, pelayan prima.

Sumber: Hasil Kegiatan FGD di Bappeda Kab. Lumajang (diolah).

Dan kemudian tabel 6 menggambarkan aktivitas disperindagtam dalam penerapan e-government bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel: 6
Aktivitas Disperindagtam Kab. Banyuwangi dalam Implementasi E-Gov

No.	Implementasi E-Gov	Penerapan Kebijakan Daerah	Hambatan dialami	Masukan
1.	1. Pelaksanaan implementasi kebijakan E-Gov telah dilaksanakan secara optimal pd pelaksanaan tugas Disperindag, meliputi perencanaan anggaran maupun proses sosialisasi, informasi harga (siskaperbapo).-	1. Penerapan kebijakan daerah terhadap pelaksanaan E-Gov, telah secara optimal menerapkan E-Gov setiap pelaksanaan kegiatan diantaranya melalui optimalisasi www.banyuwangikab.go.id implementasi SIKD, e-Vellage Butgeting, LPSE,-	1. Dim pelayanan kpd masyarakat menggunakan website, adanya gangguan server yg kadang masyarakat tdk dapat mengakses homepage http://disperindagtam.banyuwangikab.go.id	1. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan produk. Senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan peralatan serta selalu berupaya secara konsisten untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam implementasi E-Gov di dalam pelaksanaan Tupoksi Disperindagtam,-
2.	2. Brainware atau SDM pengelola dlm Pelaksanaan E-Gov telah menggunakan perangkat komputerisasi, diantaranya program SIPKD, aplikasi surat menyurat (e-SABA) dan homepage http://disperindagtam.banyuwangikab.go.id	2. Wujud kinerja dgn E-Gov, berupaya memanfaatkan E-Gov dlm perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, maupun sosialisasi & dokumentasi kegiatan,-	2. Dampak pola kerja menggunakan E-Gov terhadap kegiatan efektivitas & efisien kinerja SKPD semakin meningkat dpt dilaksanakan secara online, pengawasan pelaksanaan kegiatan dpt dimonitor secara online,-	2. Kualitas barang dan jasa yg dihasilkan. upaya peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan E-Gov senantiasa diataranya melalui jalur interaksi online dengan masyarakat. Penayangan SOP di website.
3.	3. Software atau standar aplikasi (open source) dlm Penggunaan website mudah di akses masyarakat. Wujud kepastian pelayanan bidang perindag dgn menggunakan website, didalam website menayangkan SOP dpt diakses dipedomani masyarakat dlm memanfaatkan pelayanan pd Disperindagtam,-	3. Pola kerja E-Gov dlm setiap perencanaan & penganggaran kegiatan maupun sosialisasi & dokumentasi kegiatan disperindagtam secara optimal memanfaatkan program & aplikasi yg tersedia,-	3. Penerapan kebijakan E-Gov terhadap kinerja, masih adanya keterbatasan sumber daya baik dari segi ketersediaan perangkat maupun kemampuan SDM.	3. Menambah kapasitas server untuk memenuhi semua kebutuhan informasi dan pormosi daerah
4.	4. Hardware atau jaringan infrastruktur dengan implementasi kebijakan E-Gov meningkatkan kinerja menambah tingkat efisiensi pelaksanaan kinerja & pelayanan kpd masyarakat.	4. Penerapan kebijakan E-Gov daerah, berdampak kapada kinerja. Kinerja semakin efektif dan efisien.	4. Kapasitas server tidak mencukupi semua kebutuhan informasi/pormosi perindag di daerah.	4. Disperindag Provinsi sebaiknya memfasilitasi satu ruang di Website utk informasi dari daerah/pormosi perindag.
5.	5. Implementasi atau konektitasnya Pola kerja lebih terarah dan terorganisir. Mudah diakses dan diterima oleh masyarakat.	5. Wujud kinerja dgn mengimput data-data perencanaan pembangunan utk dimasukan ke akses aplikasi bisa secara online. Penerapan kebijakan daerah telah diaplikasikan, transparan & akuntabel	5. Perlu ada media dialog, pemerintah, masyakat dan pelaku usaha, terutama dlm mengelola produk unggulan dlm promosi produk, secara online.	5. Perindagtam lebih mengikutsertakan even promosi melalui pameran nasional dlm tajuik potensi daerah utk menggali masukan dari konsumen, shg kualitas produk yg dihasilkan bisa bersaing.

Sumber: Hasil Kegiatan FGD di Bappeda Kab. Banyuwangi (diolah).

Berdasarkan analisis tersebut diatas, apabila dilihat dari masing-masing peran pemerintah daerah, amat sangat bervariasi diantara empat daerah sampel, ini menunjukkan pengelolaan pemerintahan otonomi daerah tentu berbeda penerapan kebijakan dan pengambilan keputusan di antara daerah otonom.

Sebagaimana yang dicanangkan

oleh Pemerintah terhadap reformasi birokrasi yang diupayakan sejak tahun 2005-2025 yang akan datang, dalam road map tahun 2010-2014, yakni meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, sedangkan kebijakan penerapan e-gov di era pemerintahan Megawati tahun 2003, seharusnya sejalan karena merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah, maka dapat dikatakan

masih sangat jauh dari harapan reformasi birokrasi ini, dalam kenyataannya seperti yang telah dijabarkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi melalui 9(sembilan) program implementasi reformasi birokrasi pada Rakorpanas tanggal 24 November 2010, seluruh Pegawai Negeri Sipil yang sebutan saat ini Aparatur Sipil Negara, dalam upaya untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi publik yang lebih baik dengan berfokus pada reformasi sistem institusional dan reformasi perilaku birokrasi.

KESIMPULAN

Dari hasil temuan dan pokok bahasan dalam kajian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari ke empat daerah sampel yang dikaji, Kabupaten Bangkalan, Magetan, Lumajang, dan Banyuwangi sudah melaksanakan e-government, walaupun dalam pelaksanaannya masing-masing kabupaten bervariasi dalam penerapannya.
2. Kabupaten Bangkalan lebih dominan menggunakan website yang ada di Bappeda/ Pemda yang didukung oleh Dishubkominfo, namun pada website yang ada di Disperindag kurang menginformasikan potensi daerah yang ada, dalam taraf pelaksanaan menuju pematangan, dikarenakan baru taraf mempublikasikan informasi melalui website, disamping adanya interaksi antara masyarakat dengan kantor pemerintah, antara pemerintah dan pengusaha, dan antara pemerintah dengan pemerintah melalui e-mail, walaupun sering terkendala dengan konektivitas, Web Link Perindustrian Dan Perdagangan dan www.bangkalankab.go.id
3. Sedangkan Kabupaten Magetan penerapan e-government juga website dan server yang ada di Bappeda, dan yang dikelola oleh PDE, didukung oleh Dishubkominfo sedang Disperindag kurang menginformasikan potensi daerahnya. E-govermen di kabupaten Magetan tupoksinya di PDE (Pengelola Data Elektronik), jadi seluruh
4. dinas, instansi sudah dikasih sub-domain, tinggal mengisi, tetapi ternyata SKPD tidak pernah mau mengisi, sebelumnya harus menggunakan email resmi dari kabupaten www.magetankab.go.id dan itupun masih memerlukan perjuangan panjang.
4. Kemudian Kabupaten Lumajang penerapan e-government lebih banyak dikelola oleh Bagian Humas, Subbag Pengelola Data Elektrik dan website yang ada di Pemda/ Bappeda. Kabupaten Lumajang tidak ada institusi Kominfo yang lebih banyak berperan di bidang teknologi informasi, dan BPOM yang berperan dalam pengawasan operasi pasar terhadap mamin, dan belum ada kebijakan tentang E-Government di RPJMD, belum ada perencanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informasi, sehingga Disperindag lebih banyak menginformasikan ke PDE dalam menggunakan website www.lumajangkab.go.id
5. Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan secara menyeluruh e-government disetiap institusi yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang didukung oleh website Pemda, Bappeda, dan Dishubkominfo, sehingga website yang ada Disperindag sudah cukup canggih menginformasikan potensi daerah secara digital, dengan demikian e-gov di kabupaten banyuwangi memasuki tarap pematangan ke pengembangan, <http://disperindagtam.banyuwangikab.go.id> dan www.banyuwangikab.go.id
6. Penerapan kebijakan pemerintah daerah terhadap kinerja perdagangan dan perindustrian. Dari total industri yang ada di Kabupaten Bangkalan, sudah melaksanakan kegiatan promosi menjalin kesepakatan dengan Disperindag provinsi terhadap komoditi-komoditi yang bisa dikembangkan, Di tahun 2014 sudah bisa membangun 2(dua) tower yang fungsinya nanti bisa membagi broadwich ke masing-masing SKPD. Di tahun 2015 ini sudah memasang tower pengumpul di 20 SKPD dan masih kurang karena anggaran terbatas.
7. Penerapan kebijakan pemerintah daerah terhadap kinerja perdagangan dan perindustrian Kabupaten Magetan implementasinya masih berjalan normatif dan belum adanya

terobosan yang dapat meningkatkan bidang industri dan perdagangan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, walaupun telah menerbitkan PERDA No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan dan Penataan Pasar, dalam mengeluarkan PERBUP No. 65 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

8. Penerapan kebijakan pemerintah daerah terhadap kinerja perdagangan dan perindustrian Kabupaten Lumajang yang berkenaan khusus dengan pengembangan TIK sebagai salah satu penunjang pelaksanaan E-Gov masih sebatas Instruksi Bupati (Instruksi Bupati No. 065/332/427.19/2009), belum ada kebijakan yang menekankan implementasi e-government. Namun ada upaya dalam pengendalian inflasi daerah.
9. Penerapan kebijakan pemerintah daerah terhadap kinerja perdagangan dan perindustrian Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2010 telah menerbitkan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2010, tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi. Sehingga kebijakan pelaksanaan kegiatan E-Gov terus disosialisasikan melalui SKPD terkait, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM melalui Klinik Koperasi dan UMKM (K-UMKM) yang bertugas menjembatani antara Dinas Koperasi dan UMKM, gerakan koperasi dan masyarakat pelaku UMKM.
10. Penerapan kinerja perdagangan dan perindustrian pada implementasi produk dalam Elektronik Government, masih butuh perjuangan panjang dikarenakan adanya kendala, maupun hambatan yang dialami dalam penerapan bidang perdagangan dan perindustrian seperti:
 - a. Proses produksinya masih tradisional, sehingga kapasitas produk tidak berimbang dengan demand,-
 - b. Kualitas produk belum terstandarisasi sepenuhnya,-
 - c. Pelaku usaha belum profesional kinerjanya,-
 - d. Pengemasan produk belum optimal.
11. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan dan

perindustrian di empat daerah kajian, hampir sama terstruktur mulai dari kelembagaan, kurangnya SDM, anggaran dan infrastruktur TIK, disamping kurangnya koordinasi dilaksanakan secara maksimal antar SKPD, sedang proses produksi masih tradisional, kualitas belum semuanya terstandarisasi, pelaku usaha belum profesional, pengemasan produk belum optimal, dan sumber daya belum memadai serta akses pasar terbatas. Kemudian masih adanya keterbatasan dari segi ketersediaan kapasitas/kemampuan server yang ada untuk memenuhi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengusaha dan masyarakat pengguna, disamping tidak adanya laporan feed back pelaku UMKM secara kontinyu kepada SKPD secara riil, dan masih adanya proses adaptasi pada sistem.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

A. Untuk Kabupaten/Kota

1. Implementasi E-Government bisa optimal bila didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk dukungan SDM pengelolanya, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta anggaran, sebagai contoh yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi.
2. Kelemahan lebih banyak di faktor SDM pengelola (operator), maka diperlukan adanya bintek secara berkala kepada SDM pengelola, juga pelaku usaha (UMKM), sehingga terkoneksi aktif dua arah ke dalam promosi e-government, karena strategi penerapan e-government perkembangannya semakin cepat tingkatannya, untuk itu diperlukan tenaga teknologi informatika yang mumpuni. BKD perlu formasi rekrutmen alumni teknologi informatika.
3. Disetiap SKPD, pengelola (operator) dijadikan sebagai jabatan fungsional umum yang menjanjikan (intensif),

- ada regulasi jabatan operator yang berjenjang, (operator pertama, muda, madya, hingga utama), sehingga terjadi regenerasi yang tidak terputus dan dipertimbangkan untuk dimutasi selain job operator teknologi informasi.
4. Kebutuhan informasi baik dibidang perdagangan maupun perindustrian sangat ditentukan oleh infrastruktur, kapasitas server yang ada maka diperlukan koordinasi antar SKPD Kabupaten/Kota baik di Provinsi, maupun di Pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna.
 5. Keterbatasan Kabupaten/Kota dalam mempromosikan potensi daerahnya melalui website yang ada di kabupaten/kota, maka diperlukan kerjasama lintas sektoral, SKPD termasuk Disperindag provinsi untuk memfasilitasi satu ruang (jendela) di websitenya untuk tiap daerah dalam mempromosikan potensi unggulan masing-masing daerah, sehingga para investor dapat meng-unduh lewat website yang ada di Disprindag Provinsi.
- B. Untuk Provinsi**
1. Program jangka panjang perlu adanya perencanaan pembangunan infrastruktur menara tower teknologi informasi dan komunikasi, guna membecka jaringan aplikasi yang diupayakan Kabupaten/Kota.
 2. Lebih intensif membangun koordinasi dan komunikasi dengan Kabupaten/Kota dalam konektivitas masing-masing website.
 3. Khusus Perindag Provinsi lebih inten membangun koordinasi dan komunikasi dengan Perindag Kabupaten/Kota untuk saling melengkapi database, seperti produk unggulan yang akan diekspos melalui media internet.
- Bungin, Burhan. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (2002-2004) "Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri Kecil Menengah Buku I Rencana Induk Pengembangan Industri kecil".
- Depdiknas, Pengolahan dan Analisis Data Penelitian; 2008.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication.
- Depdagri, 2009, Pemeringkatan e-Government di Indonesia, Diakses dari www.depdagri.go.id
- Depkominfo. Kondisi Situs Web Pemerintah Daerah, 2004. Diakses dari <http://www.depkominfo.go.id>
- Deliza Henny, 2006, Tinjauan Penggunaan CSSistem Informasi, Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 2, 205-212 F dan Audit Grid Dalam Analisis Aplikasi.
- Faizah N., Dana Indra S, 2009. Faktor-Faktor Sukses Implementasi e-Government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia, Digital Information & System Conference.
- Hendriawan, 2008. Content Analysis Situs Web Pemerintah Daerah, Tesis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Business Review 57, 2.
- Inpres No.3 2003. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. .
- Junaidi, 2011, Dukungan E-Government Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Elayanan Publik Di Era Otonomi Daerah : Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia, Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah, LAB-ANE FISIP Untirta

DAFTAR PUSTAKA

Boediono. (2008). Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia. Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Oktober 2008 Hal 1 - 17.

- Milles & Huberman. (2009) Analisis Data Kualitatif (Terjemahan). Jakarta, UI Press.
- Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53/m-dag/per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur
- Suhono H. Supangkat, 2006. Framework Strategi Implementasi e-Government. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Indonesia, ITB.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- Website:
- <http://disperindag.bangkalankab.go.id>, diunduh Jumat 13 Maret 2015.
- <http://bangkalankab.go.id> Situs Resmi Bangkalan, dunduh Jumat 13 Maret 2015.
- <http://www.magetankab.go.id> Dishubkominfo Kabupaten Magetan, (14/4/2015).
- www.lumajangkab.go.idwww.lumajangkab.go.id, diunduh Selasa 12 Mei 2015.
- www.banyuwangikab.go.id, diunduh Jumat 12 Juni 2015.
- <http://disperindagtam.banyuwangikab.go.id>, diunduh Jumat 12 Juni 2015
- <http://disperindag.jatimprov.go.id> website Disperindag Jawa Timur.
- www.siskaperbapo.com, diunduh Rabu 11 Maret 2015.
- blog.idkeyword.com/profil-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015/Pada tanggal 14 April 2015.
- <https://dailysocial.id/.../kemenkominfo-targetkan-pengguna-internet-di-i...>